

# **Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Di desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Induk Kabupaten Malinau**

**L.a Alam Taufan<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM ) Mandiri Di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Induk Kabupaten Malinau. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 1.BagaimanaImplementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM ) Mandiri Di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Induk Kabupaten Malinau.2. Apasajafaktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM ) Mandiri Di desa Pulau Sapi Kecamatan mentarang Induk Kabupaten Malinau.*

*Kesimpulan dari hasil penelitian ini ditinjau dari fokus penelitian yaitu pelaksanaan bidang lingkungan, dan bidang sosial sudah terlaksana dengan baik. maka diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian yang ditinjau dari fokus penelitian yang ada, diperoleh bahwa implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri sudah terlaksana dengan baik.*

**Kata Kunci : *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri***

## **Pendahuluan**

Salah satu amanat penting yang menjadi tugas negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah terus-menerus mengeluarkan berbagai kebijakan dan program pembangunan khususnya yang memihak kepada masyarakat melalui kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan pada penjelasan sebelumnya, bahwa desentralisasi (otonomi daerah) bertujuan melimpahkan sebagian besar kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, serta kesejahteraan publik makin terjamin. Selain itu, otonomi daerah secara filosofi dimaksudkan untuk pencapaian pemerataan dan keadilan, demokratisasi, menghargai nilai- nilai budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana dikemukakan pada penjelasan sebelumnya, bahwa desentralisasi (otonomi daerah) bertujuan melimpahkan sebagian besar

---

<sup>1</sup> Mahasiswa program studi administrasi Negara, fakultas ilmi social dan ilmu politik, universitas mulawarman. Email: alam.taufan@yahoo.com

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, serta kesejahteraan publik makin terjamin. Selain itu, otonomi daerah secara filosofi dimaksudkan untuk pencapaian pemerataan dan keadilan, demokratisasi, menghargai nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Isu kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah semakin besarnya jumlah penduduk miskin. Dengan jumlah penduduk miskin yang masih banyak, ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi yang pada gilirannya, kondisi tersebut mengakibatkan tingginya beban sosial ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi aktif masyarakat sehingga dibutuhkan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan.

Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin) harus difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik dan aspek lingkungan serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan sebagai jajaran pemerintahan terdepan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Didalam pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007, yang berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan obyek melainkan subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dari uraian latar belakang masalah tersebut dan dari situasi inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian dan mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah tulisan berbentuk skripsi yang berjudul "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Induk Kabupaten Malinau".

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dalam memberdayakan masyarakat di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Induk Kabupaten Malinau?

2. faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Induk Kabupaten Malinau.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Kata *policy* secara etimologis berasal dari kata polos dalam bahasa Yunani (*Greek*) berarti negara atau kota. Dalam bahasa Latin berubah menjadi *politia* yang berarti negara, sedangkan dalam bahasa Inggris Lama (*Middle English*) menjadi *policie* yang berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan.

Menurut James Anderson dalam Budi Winarno (2007:17) adalah “merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.

Definisi lain menurut Dye dalam Leo Agustino (2006:7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat, tujuan itu akan terwujud jika ada faktor-faktor pendukung (*input*).

Tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn dalam Budi Winarno (2007:3) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

2. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

3. Adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia.

5. Evaluasi Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

### ***Pengertian Implementasi Kebijakan***

Kajian teori implementasi kebijakan diawali dari Grand Theory yaitu Teori Administrasi Publik yang dikemukakan oleh Rosenbloom and Kravchuk (2005 : 140) yang menyatakan bahwa Administrasi Publik adalah the action of government, the means by which the purposes and goals of government are realized. Rosenbloom and Kravchuk (2005:5) menjelaskan core function dari administrasi publik yaitu organization; structure and process, public personnel administration and collective bargaining, budgeting and finance dan decision making. Dari penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan (yang merupakan bagian dari tahapan pada proses kebijakan publik) merupakan salah satu kajian penting yang dipelajari dalam Ilmu Administrasi Publik.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

### ***Pengertian Kemiskinan***

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan baik akademisi maupun praktisi. Berbagai teori, konsep terus berkembang untuk menyibak masalah kemiskinan. Konsep kemiskinan bersifat multi dimensional, oleh karena itu cara pandang yang digunakan oleh para ahli untuk melihat persoalan kemiskinan meliputi beberapa aspek dari kemiskinan. Menurut SMERO dalam Suharto (2005:132), menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki berbagai ciri, antara lain:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan).
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi air bersih dan transportasi).
- c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- d. Kerentanan terhadap golongan yang bersifat individual maupun missal.
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

- i. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan te rpencil.

Dari pendapat di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa persoalan kemiskinan sesungguhnya selalu terkait dengan kerentanan dan ketidakberdayaan. Berbicara mengenai kerentanan yang ada pada orang miskin biasanya disebabkan karena orang miskin dihadapkan pada kondisi yang lemah. Orang miskin tidak memiliki daya kemampuan yang cukup di banyak bidang. Orang yang miskin secara ekonomi dibarengi oleh kemiskinan dalam pendidikan, sedikit wawasan, tidak berdaya, dan tidak memiliki kekuasaan. Lemahnya sistem pertahanan ekonomi telah mempengaruhi ketahanan dibanyak bidang. Dengan demikian jika mendapatkan permasalahan ekonomi, Sudah pasti akan mengalami kesulitan dan jatuh. Kemudian berbicara mengenai ketidakberdayaan, orang yang miskin tidak memiliki daya atau kemampuan yang cukup.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah.

Untuk memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan yaitu :

1. Mobilisasi (*Community mobilization*)
2. Partisipasi Masyarakat (*Community participation*)
3. Pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community development*)

Ketiga pendekatan ini, tentunya akan diarahkan pada dua tujuan pemberdayaan, yaitu :

1. Melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, yang dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan, yang dikenal sebagai pemberdayaan politik masyarakat.

### ***Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri***

(Pedoman umum PNPM Mandiri (2007:14), tujuan diadakannya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri PNPM Mandiri yaitu dibagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus antara lain:

1. Tujuan Umum  
Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
2. Tujuan Khusus
  - a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro- poor).
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
  - g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi, dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

### ***Definisi Konsepsional***

Dengan demikian definisi konsepsional adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami.

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah upaya yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya yakni dengan adanya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang yang di antaranya adalah bidang ekonomi dan bidang lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian adalah suatu cara dalam menyelesaikan suatu masalah guna menekan batas-batas ketidaktahuan manusia. Moleong (2000:6), mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Sesuai teori diatas dan judul skripsi dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan atau mendeskripsikan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Dalam memberdayakan masyarakat.

### ***Fokus Penelitian***

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan bertitik tolak pada referensi diatas, maka diperoleh fokus penelitian yang penulis tetapkan agar dapat memberikan batasan studi pada fokus penelitian yang akan diteliti, Sehingga fokus penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Induk Kabupaten Malinau sebagai berikut:
  - a. Kegiatan bidang lingkungan.
    - Pembangunan gedung PAUD
    - Semenisasi jalan
  - b. kegiatan bidang ekonomi.
    - Modal Bergulir.
2. Faktor- faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri).

### ***Sumber Data***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Dari pengertian diatas dapat dibagi menjadi dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui informan dengan cara melakukan tanya-jawab secara langsung dan dipandu melalui pedoman wawancara sesuai dengan indikator-indikator yang penulis teliti.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber informasi antara lain melalui :
  - a. Dokumen-dokumen, laporan hasil evaluasi.
  - b. Buku-buku referensi, hasil penelitian dan media massa serta elektronik yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, pemilihan nara sumber dilakukan melalui dua tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Teknik *Purposive Sampling*
2. Teknik *Aksidental Sampling*

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam rangka memperoleh data untuk penelitian dan penulisan skripsi ini, maka teknik-teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)
2. Penelitian Lapangan (*field work research*)

Adapun untuk mengumpulkan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi,
- b. Wawancara mendalam (*indepth interview*)
- c. Dokumentasi,

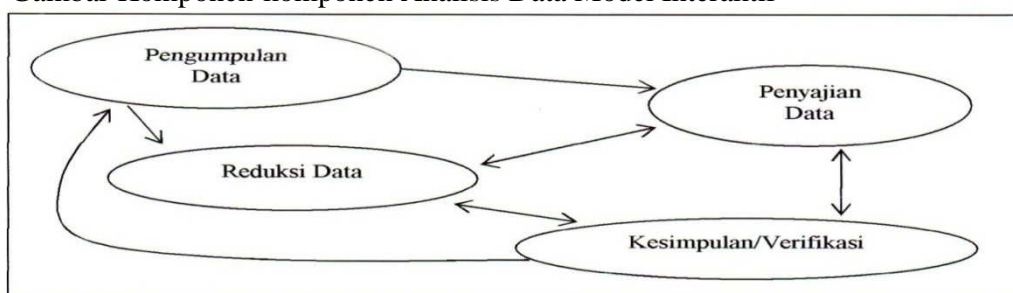
### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Deskriptif Kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Mathew B Miles dan A. Michael Huberman ( dalam Rohindi 2009:20), mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

- a. Pengumpulan Data
- b. Reduksi Data atau Penyedehanaan Data
- c. Penyajian Data atau Data *Display*
- d. Menarik Kesimpulan atau *Conclution Drawing*

Konsep Analisis Data Deskriptif Kualitatif tersebut dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut.

Gambar Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman, dalam Rohindi (2009:20)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **Kondisi Geografis**

Desa Pulau Sapi merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Mentarang Induk Kabupaten Malinau, oleh sebab itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui proses pemberdayaan, pemerintah Kabupaten Malinau melaksanakan atau mencanangkan suatu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan kepada masyarakat yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang pelaksanaannya dilakukan pada lingkup Kecamatan Mentarang Induk khususnya Desa Pulau Sapi.

Desa Pulau Sapi memiliki luas wilayah sekitar 85,47 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 8 rukun tetangga dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bahau Hulu

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Mentarang Hulu

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Malinau Barat

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Malinau Selatan

Letak geografis Desa Pulau Sapi adalah dataran tinggi 500-1000 M DPL, Orbitrase (jarak dari pusat pemerintahan – Desa) jarak dari pusat pemerintahan



Kecamatan ke Desa Pulau Sapi ± 1 kilometer dan jarak dari ibu kota Kabupaten ke Desa Pulau sapi ± 15 kilometer.

### ***Jumlah Penduduk***

Komposisi penduduk yang ada di Desa Pulau Sapi sangat heterogen. Penduduk merupakan faktor utama yang menentukan berhasil dan tidaknya suatu proses pembangunan. Oleh karena itu penduduk harus dibina, dikembangkan dan diberdayakan sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang produktif dan dapat meningkatkan ekonominya yang tentu akan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan bagi kehidupannya. Jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Pulau Sapi adalah 921 Kepala Keluarga yang tersebar 8 Rukun Tetangga (RT). Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penduduk yang ada di Desa Pulau Sapi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1 : Jumlah Penduduk Desa Pulau Sapi Tahun 2012**

No	Nama RT	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempun	
1	RT. 01	118 jiwa	104 jiwa	269
2	RT. 02	102 jiwa	93 jiwa	271
3	RT. 03	101 jiwa	91 jiwa	274
4	RT. 04	106 jiwa	89 jiwa	270
5	RT. 05	113 jiwa	95 jiwa	248
6	RT. 06	97 jiwa	87 jiwa	262
7	RT. 07	111 jiwa	101 jiwa	256
8	RT. 08	109 jiwa	102 jiwa	263
jumlah		857	762	1.619

*Sumber : Kantor Kecamatan Mentarang*

### ***Mata Pencarian***

Tingkat kehiduapan suatu masyarakat sangat dominan dan dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh keadaan struktur ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat tersebut. Dengan demikian tingkat kesejahteraan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kehidupan ekonominya, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai acuan tentang perkembangan ekonomi suatu daerah. Berikut ini adalah keadaan ekonomi masyarakat di Desa Pulau Sapi ditinjau dari segi pekerjaan atau mata pencarian.

**Tabel 2 : Data Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencahrian**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	697
2	Pegawai negeri sipil	317
3	Nelayan	38
4	Tenaga honor	27
5	Pensiunan	11
Jumlah		989

*Sumber : Kantor Kecamatan Mentarang*

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Pulau Sapi sebagian besar berprofesi sebagai petani. Sedangkan untuk pekerjaan lain terlihat lebih sedikit. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Pulau Sapi memiliki pekerjaan dan mata pencarian yang berbeda-beda.

### **Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau Sapi sudah cukup baik. Mayoritas penduduk yang ada di Desa Pulau Sapi telah mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Akan tetapi masih ada anak yang putus sekolah dikarenakan tidak adanya biaya untuk membayar biaya pendidikan. Hal tersebut menjadi permasalahan karena peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

### **Pemeluk Agama**

Agama dan kepercayaan merupakan pegangan bagi setiap manusia dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan agama dan kepercayaan yang menjadi keyakinan manusia akan dapat membangun dan menguatkan sikap dan mental manusia itu sendiri. Hal ini sangat dibutuhkan oleh setiap manusia dalam mengisi pembangunan, dimana agama sebagai penyaring dan membentuk keseimbangan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan keseimbangan pembangunan. Dilihat dari jumlah Prasarana tempat ibadah yang ada, maka di Desa Pulau Sapi terdapat 2 buah gereja dan 1 buah masjid.

Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3 : Jumlah penganut agama di Desa Pulau Sapi**

No	Agama	Jumlah
1	Kristen protestan	1.552
2	katolik	40
3	Islam	27
4	hindu	-
5	budha	-
jumlah		1.619

*Sumber : Kantor Kecamatan Mentarang*

Dari tabel 3 diatas, maka dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Pulau Sapi mayoritas beragama kristen protestan dengan jumlah 1.552 jiwa. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat yang ada Desa Pulau Sapi merupakan masyarakat yang agamis. Dalam hal ini kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama yang ada di Desa Pulau Sapi tetap saling terjaga, saling menghargai dan saling menghormati.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian ini permasalahan yang diukur adalah Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau yang meliputi bidang lingkungan, dan bidang ekonomi, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Maka berdasarkan hasil penelitian ini penulis akan membahas sesuai dengan indikator-indikator dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### **1. Pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan**

Pelaksanaan kegiatan pada bidang lingkungan yang terdapat didalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) adalah meminimalkan efek negatif dan memaksimalkan dampak positif dari setiap kegiatan kontruksi. Pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan ini di lakukan pada pertengahan tahun 2010-2011 dengan menganggarkan pembuatan Gedung PAUD dan semenisasi jalan. Dalam hal ini sifat kemanfaatan secara langsung memberikan dampak/manfaat secara kolektif dengan akses melalui peningkatan kualitas lingkungan dan pendidikan lebih.

Masyarakat yang pada mulanya menjadi objek pembangunan kini dapat menjadi subjek dari pembangunan tersebut, sehingga terbentuk LKM dan KSM dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. Aspirasi yang disampaikan masyarakat dari tingkat RT kemudian disampaikan pada forum di Desa dan dibahas menjadi skala prioritas yang tertuang didalam PJM Pronangkis ( perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan) dalam pembangunan didaerahnya dan aspirasi inilah yang akan menjadi faktor dominan terciptanya masyarakat yang peduli dalam pembangunan. Sama halnya dengan adanya undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, yang mana memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan tersebut membuka peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksakan fungsi-fungsinya atas prakarsa sendiri, berdasarkan dengan kepentingan serta preferensi publik setempat dan potensi daerah.

## ***2. Pelaksanaan Kegiatan Pada Bidang Ekonomi***

Pelaksanaan kegiatan pada bidang ekonomi ini merupakan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dalam rangka menunjang pendapatan. Dalam hal ini, yang dimaksud keterampilan adalah bahwa setiap masyarakat/warga pasti memiliki potensi atau kemampuan yang ada didalam dirinya masing-masing. Akan tetapi yang menjadi faktor utama tidak tergalinya potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut adalah tidak adanya biaya atau modal yang dapat menunjang potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan dibidang ekonomi ini, PNPM-MPD di Desa Pulau Sapi ini lebih mengarah kepada kegiatan yang berbentuk pemberian pinjaman dana secara berkelompok untuk mengembangkan usaha baru serta menambah modal usaha yang telah ada. Melalui kegiatan pada bidang ekonomi tersebut diharapkan bahwa nantinya masyarakat yang mendapatkan atau menerima bantuan modal tersebut dapat lebih meningkatkan kualitas sumberdaya manusia atau potensi yang dimilikinya untuk menuju kepada kesejahteraan kehidupan.

Dalam hal ini ketua KSM harus bertanggung jawab penuh terhadap dana bergulir yang telah diberikan tersebut. Karena ketua KSM merupakan pelaksana dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh LKM melalui berbagai dana yang mampu untuk digalang atau diterima guna terlaksana dan berjalanya program kegiatan dana bergulir di Desa Pulau Sapi yang sudah pasti tujuan utamanya adalah pengembangan modal usaha ekonomi.

### ***Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat***

#### **Faktor Internal**

Kualitas sumber daya manusia dan tehnologi yang dimiliki oleh LKM (lembaga keswadayaan masyarakat) yang ada di Desa Pulau Sapi dan sebagai faktor internal pada umumnya sudah tergolong cukup baik. Hal ini dilihat dari latar belakang pendidikan dari para anggota LKM bervariasi antara lain adalah lulusan SMA, dan S1.

Dalam hal ini bisa dikatakan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki LKM Kelurahan Tanjung Selor Timur sudah cukup baik untuk dapat menjadi perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau usulan dari masyarakat setempat. Tetapi sebenarnya yang menjadi masalah disini adalah bahwa diantara anggota LKM ini ada oknum-oknum yang menyelewengkan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Sebagai contoh misalnya saja ketika LKM melakukan pendataan kepada warga miskin, ada oknum dari LKM tersebut yang secara tidak langsung mendata dan mengikutsertakan keluarga mereka yang dalam hal ini masih bisa dikatakan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan melihat keadaan tersebut, fasilitator PNPM Mandiri beserta aparatur Desa yang merupakan pendamping untuk berjalannya program tersebut dapat secara langsung memberikan bimbingan dan melakukan evaluasi agar hal tersebut tidak

selalu terjadi selama berjalannya program PNPM Mandiri di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.

### ***Partisipasi Masyarakat***

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Pulau Sapi, masyarakat terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat berhak untuk menentukan sendiri program dan kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan terhadap penanggulangan kemiskinan, sehingga masyarakat dapat bersama membangun kemandirian dalam pengembangan lingkungan, dan ekonomi didalam masyarakat dengan pemerintahan daerah dan kelompok peduli setempat yang secara representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat dimasa mendatang.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program pembangunan yang menggunakan pendekatan berbasis pemberdayaan kepada masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan semakin meningkatnya pola pemberdayaan pada masyarakat, secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat yaitu meningkatnya tingkat perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk pemberdayaannya adalah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari PNPM Mandiri yaitu mencakup bidang lingkungan, dan bidang sosial melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) beserta pemerintahan daerah. Namun tidak semua masyarakat terlibat dan masuk kedalam kepengurusan LKM. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat disini sebagai inisiator, pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan, dan bidang ekonomi dilaksanakan bersama oleh LKM beserta masyarakat berdasarkan pada keinginan dan usulan dari masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) dalam rangka pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.

### **Penutup**

Adapun kesimpulan dari skripsi yang berjudul Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau yaitu :

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Induk Kabupaten Malinau pada kegiatan yang mencakup bidang lingkungan, dan ekonomi dalam pelaksanaannya sudah dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui kegiatan dari pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan yang telah sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakatnya seiring dengan terlaksananya program tersebut, maka proses pemberdayaan sudah berjalan dengan baik yang

akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dengan semakin meningkatnya tingkat perekonomian dan perkembangan kemandirian masyarakat di Desa Pulau Sapi.

Adapun dalam skripsi ini, peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang berguna dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang khususnya Kabupaten Malinau pada umumnya. Baik yang bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai objek untuk kesejahteraan masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) yang merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hendaknya dapat melakukan pengawasan yang bertujuan agar tidak ada lagi oknum-oknum dari LKM yang menyalahgunakan kepercayaan dan tanggung jawabnya. Serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat agar dapat ditambah guna membangun kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan di Desa Pulau Sapi khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Untuk Anggaran atau dana program tersebut, harus semakin meningkat. Hal ini disebabkan semakin cepatnya pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat yang sangat mempengaruhi tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino Leo, 2006, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Matthew, B, Miles dan Huberman, Penerjemah Rohindi, Rohendi TJEPTJEP 2009 *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit UI, Jakarta.
- Winarno Budi, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Presindo, Jakarta.

#### **DOKUEN-DKUMEN**

- (<http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html>, di akses tanggal 10 januari 201).
- (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>, di akses 10 januari 2013).
- (<http://dokter-kota.blogspot.com/2012/08/pemberdayaan-masyarakat.html>, di akses tgl 10 januari 2013).